



UNTUK YANG KESEMBILAN KALINYA Tanggap Darurat DIY Kembali Diperpanjang

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19 di DIY. Perpanjangan status tanggap darurat tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 28/KEP/2021, yang diberlakukan selama sebulan mulai 1 hingga 28 Februari 2021.

"Di tengah pelaksanaan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemda DIY kembali memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19. Kebijakan perpanjangan ini sudah kesembilan kalinya diberlakukan. Seperti sebelumnya, perpanjangan status tanggap darurat diterapkan karena tren penularan Covid-19 di DIY masih tinggi. Perpanjangan status dilakukan untuk kesinambungan penanganan dan mengantisipasi adanya dampak Covid-19," jelas Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kematian, Yogyakarta, Senin (1/2).

Sekda DIY mengatakan, meski edukasi dan pengawasan terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) terus dilakukan, namun semua itu belum sepenuhnya diimbangi kesadaran masyarakat dalam penegakan prokes. Hal itu bisa dilihat dari sebagian masyarakat masih

abai dalam penegakan prokes, meski kebijakan PTKM sudah diberlakukan.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap penambahan kasus Covid-19. "Saat ini penularan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di lingkungan perkantoran, tapi sudah mengarah ke kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga dan tetangga. Salah satu penyebabnya karena penegakkan prokes yang belum optimal. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau keluar rumah pakai masker tapi kalau di dalam rumah tidak memakai masker," ungkapnya.

Baskara Aji mengungkapkan, untuk mengatasi hal itu, sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY. Salah satunya dengan meminta Satpol PP untuk mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten/ kota terkait persiapan pembatasan wilayah di tingkat RT/RW dan desa. Karena kebijakan itu dinilai efektif untuk mengurangi penularan Covid-19 seperti yang dilakukan saat awal-awal pandemi di DIY.

"Saat ini pendirian posko yang mengawasi mobilitas masyarakat tidak banyak lagi. Padahal kalau diberlakukan kembali diharapkan bisa mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk dari luar daerah," terangnya.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005